ARTI PENTING DIBENTUKNYA PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA

Nama Mahasiswa :Hero Satriawan

Email : rhosatriawan07gmail.com

No Bp : 1910003600291

Perguruan Tinggi

Ilmu Hukum (UNIVERSITAS EKA SAKTI PADANG)

A.PENDAHULUAN

Negara RI adalah negara hukum salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yg merdeka termasuk di dalamnya ada peradilan Natausaha Usah Negara,dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yg merasa dirinyanya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara.Berbagai macam KTUN dapat digugat ke PTUN,hal ini disebabkan berbagai macam perbuatan pecabat atau usaha negara seperti perijinan (vergunning),dispensasi , konsesi, dan pengurusan surat-surat dituan kan dalam bentuk keputusan pejabat (beschikking).salah satu KTUN yg dapat menjadi objek sengketa i pengadilan tata usaha negara adalah izin dibidang lingkungan.

Persyaratan-persyaratan yg terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri, Dalam konteks pengelola lingkungan hidup, maka substansi pengelola lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang terwujudnya sistem pembangunan berkelanjutan,apabila administrasi pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan terpadu.

Dalam prakteknya sistem perizinan belum mampu berfungsi sebagai pengadilan agar suatu usaha dan kegiatan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Maksud adanya peradilan adalah memberikan keadilan kepada para pihak dan demikian menghilangkan sengketa.sengketa merupakan suatu yg mengganggu ketentraman, tata tertip, dan kedamaian masyarakat,sehingga keseimbangan masyarakat tergoncang karenanya.

B. PEMBAHASAN

1. Arti Penting Dibentuknya Hukum Tata Usaha Negara

Sebagai berwujud dan Indonesia sebagai Negara hukum yg menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk melaksanakan amanat pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yg telah diganti dengan undang-undang Nomor 48 tahun 2009 juncto Pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara banda aceh, pekanbaru, jambi, bengkulu, palangkaraya, palu, kendari, yogyakarta, mataram, dan dili.

2. Hukum Dan Wewenang

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 50 jo. pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 5 tahun 1986 juncto undang-undang nomor 51 tahun 2009.

Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara .

3. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

- Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang perubahan kedua atas undang-undang : 5 tahun 198, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

4. Fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan

Fungsi PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya memberikan perlindungan dalam hal lingkungan hidup yang menderita karena telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yg bergerak dibidang lingkungan hidup (organisasi lingkungan hidup) dapat menggugat pejabat dan badan tata usaha negara ke pengadilan TUN karena pejabat atau badan yang bersangkutan telah memberikan izin kepada perusahaan yg kegiatannya potensial atau telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dasar hak gugat organisasi lingkungan hidup adalah pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa ada tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril
3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - o berbentuk badan hukum;
 - o menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - o telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat (2) tahun.

Diberikannya hak gugat terhadap organisasi lingkungan hidup, diharapkan organisasi lingkungan hidup tersebut dapat berperang dalam memperjuangkan upaya pelestarian lingkungan melalui pengadilan, termasuk diantaranya melalui pengadilan tata usaha negara . Menurut Aan Effendi, penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN memiliki kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan umum, baik itu melalui gugatan perdata maupun tuntutan secara pidana. penyelesaian sengketa melalui PTUN adalah bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan kegiatan dengan dibatalkannya izin lingkungan tersebut berarti suatu usaha atau kegiatan tidak dapat melanjutkan lagi

usaha atau kegiatannya sehingga sumber pencemarannya dapat dihentikan. Di dalam praktiknya, kelebihan yang disampaikan Aa Effendi ini sulit untuk direalisasikan melalui gugatan organisasi lingkungan hidup. Gugatan-gugatan yg diajukan oleh organisasi lingkungan hidup ke PTUN sering mengalami kegagalan memperjuangkan lingkungan hidup.

C.PENUTUP

Fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. putusan-putusan pengadilan TUN yang obyek sengketa dibidang lingkungan hidup belum memberikan perlindungan kelestarian secara optimal, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya, dan kurang menyentuh substansi atau pokok perkaranya terkait dengan lingkungan hidup dan kelestariannya. Dalam beberapa putusan pengadilan TUN yang obyek sengketa sama yaitu mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan diputus secara bertentangan dan lebih memihak kepada pemilik modal besar dari pada memberikan perlindungan terhadap kelestarian hutan. belum optimalnya fungsi PTUN disebabkan adanya kendala-kendala yang meliputi kendala terhadap peraturan perundang-undangan, kendala terhadap asas-asas hukum, dan kendala terhadap pelaksana hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang: "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku (vide pasal 50 jo. pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 5 tahun 1986 juncto undang-undang nomor 9 tahun 2004 juncto undang-undang nomor 51 tahun 2009)".

Sarat untuk mengatasi belum optimalnya fungsi PTUN adalah melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ; memasukkan asas pembangunan berkelanjutan dan asas pencegahan dini sebagai dasar pengujian KTUN obyek sengketa dalam penyelesaian sengketa di PTUN; segera dibentuk pengadilan TUN di tiap kabupaten/kota dan pengadilan tinggi TUN di tiap provinsi; memberikan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pejabat yg tidak melaksanakan putusan PTUN ;

dibentuk pengadilan khusus lingkungan di bawah pengadilan tata usaha negara yg diharapkan mampu memeriksa dan menmgadili sengketa secara mendalam dari aspek substansi.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.